

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

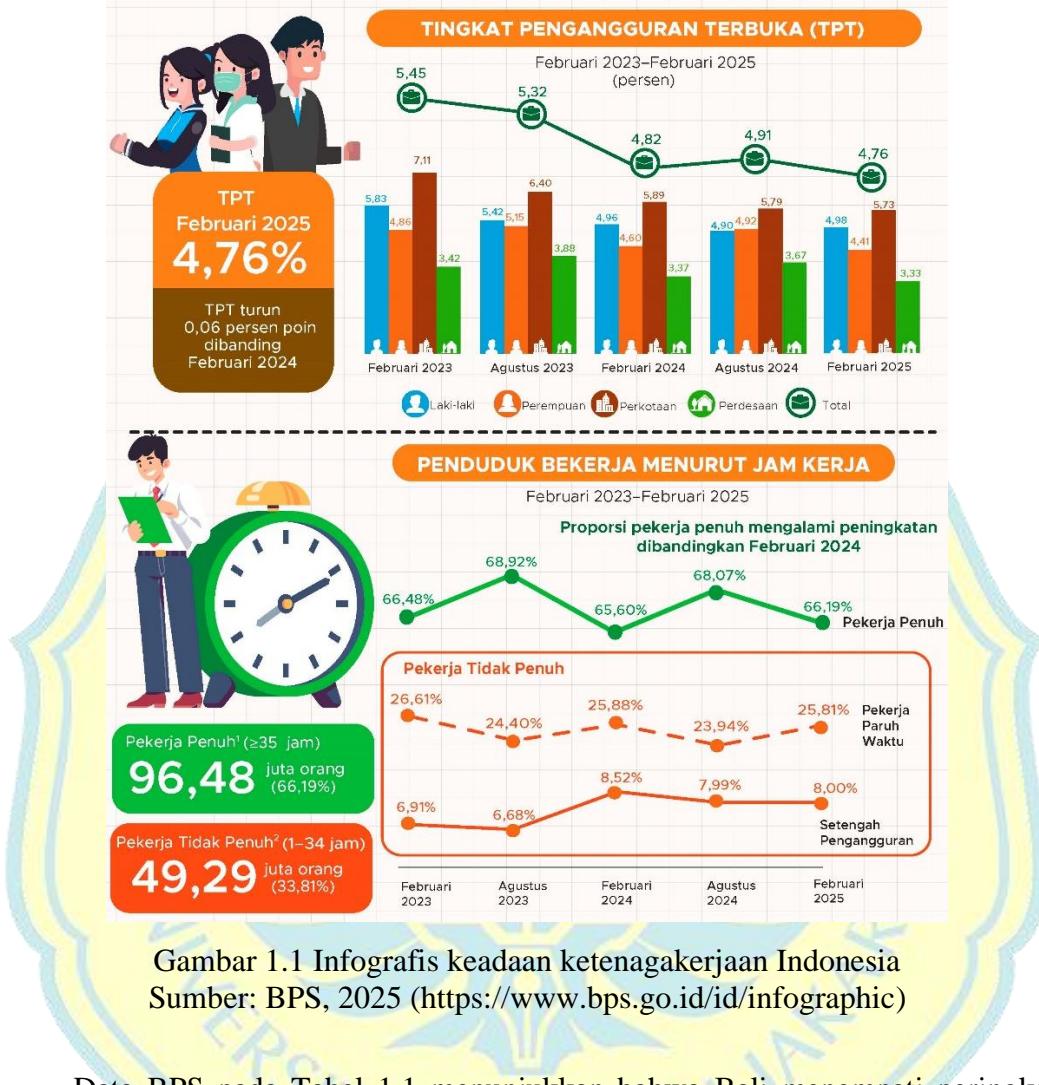
#### **A. Latar Belakang**

Ketenagakerjaan merupakan salah satu indikator utama dalam menilai kondisi sosial-ekonomi suatu negara (Hauschmidt et al., 2024; Poirier et al., 2020). Ketersediaan dan kualitas lapangan kerja mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat serta efektivitas kebijakan pembangunan nasional (Silalahi & Walsh, 2023). Di tengah dinamika ekonomi global, Indonesia terus menghadapi berbagai isu dalam sektor ketenagakerjaan seperti pengangguran, ketimpangan akses kerja antara wilayah perkotaan dan perdesaan, serta tingginya proporsi pekerja informal dan tidak penuh (Saputra et al., 2025).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2025 seperti yang terlihat pada Gambar 1.1, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Indonesia sebesar 4,76 persen, turun 0,06 persen poin dibanding Februari 2024. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan kondisi ketenagakerjaan dan meningkatnya penyerapan tenaga kerja. TPT laki-laki tercatat 5,73 persen lebih tinggi dibanding perempuan yaitu 3,33 persen. Dari sisi wilayah, pengangguran di perkotaan (4,98 persen) juga lebih tinggi dibanding perdesaan (3,41 persen), menandakan tantangan penciptaan kerja di kota lebih kompleks karena tekanan urbanisasi. Tren TPT dua tahun terakhir berfluktuasi, namun cenderung menurun dari Februari ke Februari. Ini menunjukkan pemulihan pasar kerja berjalan positif, meskipun tetap dipengaruhi oleh faktor musiman dan struktural.

Selanjutnya, jumlah pekerja penuh ( $\geq 35$  jam/minggu) meningkat menjadi 66,19 persen atau 96,48 juta orang, naik dari 65,60 persen tahun sebelumnya. Artinya, semakin banyak penduduk memiliki pekerjaan dengan jam kerja optimal. Sebaliknya, pekerja tidak penuh (1–34 jam/minggu) masih cukup tinggi, yakni 33,81 persen atau sekitar 49,29 juta orang. Mereka terdiri dari 25,81 persen pekerja paruh waktu dan 8,00 persen setengah pengangguran, yang mencerminkan belum meratanya akses pekerjaan produktif. Meski tren ketenagakerjaan membaik, masih terdapat tantangan seperti tingginya pekerja tidak penuh dan ketimpangan antara

kota dan desa. Pemerintah perlu terus mendorong penciptaan kerja yang berkualitas dan merata.



Gambar 1.1 Infografis keadaan ketenagakerjaan Indonesia  
Sumber: BPS, 2025 (<https://www.bps.go.id/id/infographic>)

Data BPS pada Tabel 1.1 menunjukkan bahwa Bali menempati peringkat pertama sebagai provinsi dengan tingkat pengangguran terbuka terendah di Indonesia, yakni sebesar 1,58%. Rendahnya angka ini dipengaruhi pulihnya sektor pariwisata pasca pandemi, yang menjadi sektor andalan provinsi ini. Dengan banyaknya lapangan kerja di bidang jasa, perhotelan, dan industri kreatif, masyarakat Bali memiliki lebih banyak peluang untuk bekerja, baik secara formal maupun informal. Peringkat kedua diisi oleh Papua Pegunungan (Papeg) dengan tingkat pengangguran sebesar 1,68%. Wilayah ini didominasi oleh sektor pertanian subsisten dan kegiatan ekonomi berbasis komunitas, yang membuat penduduknya cenderung terlibat dalam kegiatan produktif meski tidak selalu tercatat dalam sektor formal.

Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) berada di urutan ketiga dengan tingkat pengangguran sebesar 3,02%. Di posisi keempat dan kelima ada Gorontalo dan Sulawesi Barat (Sulbar), masing-masing dengan tingkat pengangguran 3,12% dan 3,17%. Kedua provinsi ini memiliki karakteristik ekonomi daerah yang serupa, yakni bergantung pada sektor pertanian, peternakan, dan usaha mikro. Karena lapangan kerja banyak diserap oleh sektor informal, angka pengangguran cenderung rendah.

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menempati posisi keenam dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 3,18%. Selain dikenal sebagai kota pelajar dengan banyak lulusan baru tiap tahunnya, DIY juga memiliki banyak usaha kecil dan menengah (UMKM) serta sektor jasa pendidikan dan pariwisata yang banyak menyerap tenaga kerja.

Selanjutnya, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) masing-masing memiliki tingkat pengangguran sebesar 3,22% dan 3,23%. Kedua provinsi ini banyak mengandalkan sektor agrikultur dan perikanan. Provinsi Bengkulu menyusul di urutan kesembilan dengan angka pengangguran 3,24%. Di posisi kesepuluh terdapat Sulawesi Tenggara (Sultra) dengan tingkat pengangguran 3,27%. Sektor tambang dan industri pengolahan nikel menjadi motor penggerak utama ekonomi provinsi ini. Meskipun demikian, peran sektor informal dan kegiatan pertanian di pedesaan tetap penting dalam menekan angka pengangguran.

Tabel 1.1 Tingkat pengangguran terbuka (TPT) menurut Provinsi 2025

No	Provinsi	Tingat Pengangguran
1	Bali	1,58
2	Papua Pegunungan	1,68
3	Sulawesi Tengah	3,02
4	Gorontalo	3,12
5	Sulawesi Barat	3,17
6	DI Yogyakarta	3,18
7	Nusa Tenggara Barat	3,22
8	Nusa Tenggara Timur	3,23
9	Bengkulu	3,24
10	Sulawesi Tenggara	3,27
...	...	...
33	DKI Jakarta	6,18

Sumber: BPS, 2025 (<https://www.bps.go.id/id/infographic>)

Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di DKI Jakarta tercatat sebesar 6,18% naik 0,15 persen poin dari Februari 2024. Tingginya TPT tersebut dijelaskan oleh beberapa faktor struktural dan sosial ekonomi. *Pertama*, Jakarta merupakan pusat urbanisasi dan migrasi dari berbagai daerah di Indonesia. Para penduduk baru datang ke ibu kota dengan harapan mendapatkan pekerjaan, meskipun sering kali tanpa keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, sehingga menciptakan surplus tenaga kerja. *Kedua*, pasar tenaga kerja di Jakarta sangat kompetitif dan menuntut sumber daya manusia dengan kualifikasi tinggi. Mereka yang tidak memenuhi standar ini cenderung kesulitan memperoleh pekerjaan dan akhirnya menganggur (BPS Provinsi DKI Jakarta, 2025).

Jika ditinjau berdasarkan jenjang pendidikan pada Tabel 1.2, terlihat bahwa tingkat pengangguran cenderung lebih tinggi pada lulusan jenjang menengah atas dan kejuruan. TPT tertinggi tercatat pada lulusan SMA Kejuruan, yaitu sebesar 8,47% secara total, dengan rincian 8,2% untuk laki-laki dan 8,96% untuk perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa lulusan SMK, meskipun telah memiliki keterampilan vokasional, masih menghadapi tantangan dalam memasuki pasar kerja. Lulusan SMA umum memiliki TPT sebesar 6,83%, di mana perempuan mengalami pengangguran lebih tinggi (8,24%) dibanding laki-laki (6,24%). Lulusan universitas mencatatkan TPT sebesar 5,05%, yang menunjukkan bahwa meskipun berpendidikan tinggi, sebagian lulusan perguruan tinggi tetap mengalami kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan. Demikian juga pada jenjang Diploma I/II/III, TPT tercatat sebesar 4,46%, dengan perempuan (3,89%) memiliki angka lebih rendah dibanding laki-laki (4,97%). Menariknya, TPT pada jenjang pendidikan rendah seperti  $\leq$ SD dan SMP justru lebih rendah dibanding lulusan SMA, yakni masing-masing 4,97% dan 4,15%. Hal ini bisa jadi disebabkan karena lulusan dengan pendidikan rendah cenderung bekerja di sektor informal yang tidak terlalu selektif. Secara keseluruhan, TPT di DKI Jakarta pada tahun 2024 tercatat sebesar 6,21%, dengan sedikit perbedaan antara laki-laki (6,23%) dan perempuan (6,17%).

Peningkatan TPT di Jakarta pada awal 2025 ini menunjukkan adanya tantangan dalam penyerapan tenaga kerja, terutama bagi lulusan SMK. Peningkatan ini juga sejalan dengan adanya peningkatan jumlah pengangguran, dari 327.600

orang pada Februari 2024 menjadi 338.390 orang pada Februari 2025 (BPS Provinsi DKI Jakarta, 2025).

Tabel 1.2 Tingkat pengangguran terbuka menurut pendidikan di DKI Jakarta

Jenjang Pendidikan AK	Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin di Provinsi DKI Jakarta (Persen)		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
	2024	2024	2024
≤ SD	5,32	4,6	4,97
SMP	4,85	3,11	4,15
SMA Umum	6,24	8,24	6,83
SMA Kejuruan	8,2	8,96	8,47
Diploma I/II/III	4,97	3,89	4,46
Universitas	5,17	4,9	5,05
Total	6,23	6,17	6,21

Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta, 2024

(<https://jakarta.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTI4MiMy/tingkat-pengangguran-terbuka-menurut-pendidikan-dan-jenis-kelamin-di-provinsi-dki-jakarta-.html>)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya minat siswa SMK untuk bekerja dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti pengaruh teman sebaya maupun orang tua (Andriansyah & Kamalia, 2021). Hal ini berdampak pada rendahnya daya serap lulusan SMK oleh dunia usaha dan dunia industri (DUDI) (Mahmudah & Baswedan, 2024). Penelitian Krisnamurti (2017) mengungkapkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara prestasi belajar dan keaktifan organisasi terhadap kesiapan kerja siswa, sementara faktor gender, pendidikan, dan pendapatan orang tua tidak berpengaruh secara langsung. Namun, secara bersama-sama, prestasi belajar, gender, keaktifan organisasi, pendidikan, dan pendapatan orang tua tetap memberikan pengaruh terhadap kesiapan kerja. Selanjutnya, Ihsan (2017) menegaskan bahwa faktor kemampuan merupakan aspek terkuat yang memengaruhi kesiapan kerja siswa SMK. Faktor ini meliputi prestasi belajar, tingkat intelektual, pengalaman praktik, kedisiplinan, ekspektasi terhadap dunia kerja, serta bakat. Kesiapan kerja siswa juga dipengaruhi oleh faktor akademis, perilaku, potensi diri, serta faktor bawaan atau warisan.

Sejalan dengan hal tersebut, Sitorus & Sos (2016) menekankan pentingnya tindak lanjut revitalisasi SMK sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Beberapa poin penting dari kebijakan ini antara lain: (1) mewujudkan keterhubungan (link and match) antara sekolah dengan DUDI; (2) mengubah paradigma dari *push* menjadi *pull*, yaitu dari sekadar mencetak lulusan tanpa memperhatikan kebutuhan pasar menjadi mencetak lulusan sesuai permintaan pasar kerja, baik dari aspek budaya kerja maupun kompetensi; (3) mengalihkan pembelajaran dari *supply driven* menjadi *demand driven*; serta (4) menyiapkan lulusan agar mampu bekerja, melanjutkan pendidikan, atau berwirausaha.

Permasalahan klasik dalam penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) hingga kini masih belum terselesaikan secara tuntas. Beberapa di antaranya adalah: *Pertama*, masih rendahnya kualitas pembelajaran di SMK yang disebabkan oleh lemahnya implementasi kurikulum sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja, keterbatasan jumlah guru produktif yang berkualitas, keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan, serta belum optimalnya sistem penilaian dan penjaminan mutu. *Kedua*, keterbatasan dalam memperoleh mitra kerja (Dunia Usaha dan Dunia Industri/DUDI) yang mampu menampung siswa dan menyesuaikan jadwal praktik kerja industri (prakerin). Dalam hal ini, masih sering ditemui ketidaksesuaian (mismatch) antara program keahlian yang dipelajari siswa di sekolah dengan jenis pekerjaan yang dilakukan di DUDI, serta durasi prakerin yang kurang memadai sehingga kompetensi siswa tidak berkembang secara optimal. *Ketiga*, belum optimalnya tata kelola dalam penyelenggaraan SMK (Slamet, 2016; Sumantri et al., 2019). Selain itu, kualitas lulusan SMK juga masih menjadi perhatian serius. Kesiapan kerja yang rendah, lemahnya *soft skills* seperti disiplin, etos kerja, karakter, kejujuran, kecakapan, keterampilan, kompetensi, serta budaya kerja merupakan aspek yang kerap dikeluhkan oleh pihak DUDI (Noor & Waluyo, 2019).

Berdasarkan kondisi tersebut, tingginya TPT pada lulusan SMK memperkuat urgensi penguatan dan penyempurnaan program pendidikan vokasi, salah satunya melalui pengembangan program SMK 4 Tahun. Menteri Pendidikan Dasar dan

Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menegaskan bahwa perpanjangan masa studi ini akan fokus pada satu hal utama yaitu persiapan kerja ke luar negeri. Kebijakan ini akan dimulai dari SMK-SMK unggulan atau yang sudah berstatus Pusat Keunggulan (PK).

Dalam konteks pembangunan Indonesia menuju *Indonesia Emas 2045*, revitalisasi pendidikan vokasi menjadi salah satu prioritas utama sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Salah satu bentuk revitalisasi tersebut adalah penerapan kebijakan SMK empat tahun berorientasi internasional, yang bertujuan memperkuat kompetensi teknis, karakter, serta kesiapan kerja lulusan agar mampu bersaing di pasar tenaga kerja global. Program SMK empat tahun dirancang untuk memberi ruang pendalaman kompetensi dan praktik industri yang lebih intensif, terutama melalui *link and match* dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) serta lembaga sertifikasi internasional. Namun, efektivitas implementasi kebijakan ini di lapangan sangat bergantung pada kesiapan sekolah, kapasitas manajemen, sumber daya guru, dan dukungan mitra industri. Dalam praktiknya, terdapat variasi hasil implementasi antar sekolah, baik negeri maupun swasta, yang menunjukkan adanya perbedaan dalam strategi, dukungan kebijakan, dan budaya organisasi sekolah.

Pemerintah mendorong program SMK empat tahun didasari oleh beberapa alasan kuat yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja saat ini. *Pertama*, tingginya minat lulusan SMK untuk bekerja di luar negeri menjadi perhatian utama. Banyak di antara mereka yang belum memiliki kesiapan dari segi kompetensi global, bahasa, maupun pemahaman budaya kerja internasional. Tahun tambahan dalam program ini diharapkan mampu membekali siswa dengan keterampilan global agar lebih siap dan kompetitif di pasar kerja internasional. *Kedua*, program ini memperkuat aspek praktik melalui kolaborasi dengan Balai Latihan Kerja (BLK), yang memungkinkan siswa mendapatkan pengalaman langsung di bidang keahlian mereka. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan kemampuan teknis dan profesional mereka sesuai dengan kebutuhan industri. *Ketiga*, berdasarkan hasil penelitian, lulusan dari program SMK empat tahun menunjukkan peningkatan kompetensi yang signifikan dan memiliki peluang lebih cepat untuk mendapatkan

pekerjaan. Pengalaman industri yang mereka peroleh selama masa pendidikan membuat mereka lebih siap dan lebih diminati oleh dunia usaha dan dunia industri.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), tujuan utama didirikannya SMK adalah untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang tertentu dan siap langsung memasuki dunia kerja. Dalam konteks kebutuhan tenaga kerja luar negeri, SMK memiliki potensi besar dalam menyiapkan sumber daya manusia karena memiliki daya saing keterampilan, keahlian teknis, kemampuan beradaptasi, serta keterampilan komunikasi, sosial dan budaya yang diperlukan untuk bekerja di lingkungan internasional. Seiring dengan perkembangan industri dan digitalisasi di luar negeri maupun dalam negeri, SMK juga terus bertransformasi untuk memastikan bahwa kurikulum dan metode pembelajarannya tetap relevan dengan kebutuhan pasar kerja, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Sejalan dengan itu, Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kepmendikristek) Nomor 244/M/2024 tentang Spektrum Keahlian dan Konversi Spektrum Keahlian SMK pada Kurikulum Merdeka semakin memperkuat relevansi program SMK dengan kebutuhan tenaga kerja global. Keputusan ini menetapkan spektrum keahlian yang lebih adaptif terhadap kebutuhan industri dan dunia kerja, termasuk sektor-sektor yang relevan dengan peluang kerja di luar negeri. Dalam Kepmendikristek ini tertuang Konsentrasi Keahlian (KK) bagi SMK yang harus menuntaskan ketertampilan selama 3 dan 4 tahun.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan SMK/MAK memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan pendidikan kejuruan empat tahun. Program ini dirancang untuk memperpanjang masa pembelajaran dari tiga menjadi empat tahun, dengan penambahan satu tahun untuk pendalaman kompetensi, praktik kerja industri, serta penguatan karakter dan kemampuan bahasa asing, terutama bahasa Inggris dan bahasa negara tujuan kerja. Kebijakan ini juga sejalan dengan program Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016, yang menekankan pentingnya penyelarasan antara pendidikan kejuruan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Melalui revitalisasi vokasi, pemerintah berupaya meningkatkan

relevansi, mutu, dan daya saing lulusan SMK agar siap bersaing di tingkat global. Salah satu implementasinya adalah penguatan kerja sama dengan industri, peningkatan sertifikasi kompetensi, serta orientasi kurikulum terhadap kebutuhan pasar kerja internasional.

Soenarto et al. (2017) telah melakukan penelitian evaluasi menggunakan model CIPPO (*context, input, process, product, and outcomes*) yang bertujuan mengungkapkan tingkat *employability* lulusan SMK 4 tahun. Temuannya menunjukkan bahwa: (1) lulusan unggul dalam kedisiplin, keuletan, kemampuan teori, kemampuan praktek, rasa percaya diri, ketelitian, kreativitas, dan kepemimpinan; (2) kompetensi guru unggul dalam membimbing siswa, menghasilkan bahan ajar, mengembangkan bengkel, dan membangun kerja sama dengan DU/DI; (3) kecepatan mendapat pekerjaan, jumlah lulusan yang bekerja, dan penghasilan lebih baik; dan (4) kepuasan kerja lulusan lebih baik.

Empat komponen penting dalam penyelenggaraan SMK 4 tahun menurut Yudha (2015) yaitu: (1) komponen input terdiri dari penerimaan peserta didik baru, kurikulum, kompetensi pendidik, manajemen mutu, dan sarpras; (2) komponen proses terdiri dari pelaksanaan pembelajaran dan pelaksanaan prakerin; (3) komponen *output* yang terdiri dari hasil prestasi akademik dan kompetensi yang didapatkan oleh siswa; dan (4) komponen *outcome* yang terdiri dari pengakuan dari pihak industri dan keterserapan lulusan.

Kedua hasil penelitian tersebut menyiratkan bahwa lulusan SMK empat tahun unggul dalam aspek *soft skills* maupun *hard skills*, dengan dukungan kompetensi guru serta kualitas manajemen pembelajaran yang berdampak pada peningkatan kecepatan memperoleh pekerjaan, tingkat penghasilan, dan kepuasan kerja. SMK 4 tahun tidak hanya menyiapkan lulusan dengan kompetensi teknis, tetapi juga memperkuat aksesibilitas terhadap pasar kerja, termasuk peluang di tingkat global melalui pengakuan industri dan keterserapan lulusan.

Yulfizar dan Zulganef (2023) menegaskan bahwa implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) terbukti memberikan dampak positif terhadap peningkatan mutu pendidikan, khususnya dalam aspek kehadiran siswa, prestasi akademik, dan efektivitas manajemen sekolah. MBS juga berperan penting dalam meningkatkan daya saing kerja lulusan, yang ditopang oleh enam elemen utama,

yaitu keterhubungan sekolah dengan masyarakat, kurikulum yang selaras dengan standar industri, kualitas guru, ketersediaan fasilitas modern, dukungan pendanaan yang memadai, serta motivasi siswa.

Andriansyah dan Kamalia (2021) mengatakan bahwa implementasi Standar Nasional Pendidikan (SNP) berpengaruh signifikan terhadap peningkatan peluang kerja lulusan sekolah kejuruan. Standar Penilaian Pendidikan (SNP 8) yang menempati bobot tertinggi menjadi kunci dalam memastikan bahwa kemampuan lulusan dapat terukur sesuai standar internasional. Sementara itu, Standar Proses (SNP 2) dan Standar Isi (SNP 1) mendukung keterkaitan kurikulum dengan kebutuhan global, khususnya dalam bidang keterampilan teknis dan bahasa asing. Sebaliknya, lemahnya kontribusi standar pendidik, tenaga kependidikan, serta sarana dan prasarana menunjukkan adanya tantangan bagi SMK 4 Tahun untuk menyiapkan ekosistem pendidikan yang benar-benar sejalan dengan tuntutan dunia kerja internasional. Dengan demikian, fokus peningkatan mutu pada aspek penilaian, proses, dan isi kurikulum menjadi krusial agar lulusan memiliki akses lebih luas terhadap kesempatan kerja di luar negeri.

Peningkatan mutu pendidikan kejuruan tidak dapat dilepaskan dari sistem penjaminan mutu yang kokoh, kolaboratif, dan adaptif terhadap perkembangan global. Hasil diskusi dalam Konferensi Pengembangan Pendidikan Kejuruan dan Teknik Dunia 2024 di Tianjin menegaskan bahwa keberhasilan penjaminan mutu pendidikan kejuruan bergantung pada beberapa aspek utama: *benchmarking* internasional, inovasi dalam sistem, pemanfaatan teknologi, serta sinergi antara sekolah dan dunia usaha (Yang et al., 2025). Bahkan, Regel et al. (2022) menjelaskan bahwa partisipasi dan kewenangan dalam pengambilan keputusan menjadi kunci agar lembaga vokasi mampu menjawab kebutuhan nyata pemangku kepentingan sekaligus memperkuat mutu kelembagaan secara berkelanjutan. Nugroho & Miyono (2024) menambahkan dampak positif adanya sistem penjaminan mutu SMK meliputi peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan mutu standar proses, pengakuan dan prestasi tinggi, respons positif dari pasar kerja serta komitmen terhadap pembaruan. Hal ini memperlihatkan bahwa mutu pendidikan kejuruan termasuk program SMK 4 tahun akan semakin kuat jika dikelola melalui pendekatan global, inovatif, dan berbasis kemitraan, yang pada

akhirnya dapat meningkatkan daya saing lulusan dalam mengakses pasar kerja, termasuk di tingkat internasional.

Peningkatan mutu lulusan SMK menjadi salah satu fokus utama dalam pembangunan pendidikan vokasi. Salah satu indikator keberhasilan pendidikan vokasi adalah kemampuan lulusan untuk terserap di dunia kerja, baik di dalam maupun luar negeri. Namun, hingga kini masih banyak SMK yang menghadapi tantangan serius dalam menghasilkan lulusan yang benar-benar kompeten dan siap kerja secara global. Masalah utama yang muncul adalah rendahnya relevansi antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan pasar kerja internasional. SMK masih berfokus pada pemenuhan standar administratif daripada pengembangan sistem mutu berbasis kinerja lulusan. Selain itu, keterbatasan kerja sama internasional, kurangnya pelatihan berstandar global bagi guru, serta minimnya sertifikasi kompetensi internasional menjadi faktor yang memperlemah mutu lulusan yang diharapkan mampu bersaing di pasar kerja luar negeri. Akibatnya, tingkat penempatan kerja lulusan SMK di luar negeri masih rendah, dan kepercayaan industri terhadap kualitas lulusan SMK Indonesia belum optimal.

Program Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) empat tahun merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing lulusan, terutama dalam menghadapi kebutuhan tenaga kerja global. Melalui kebijakan ini, peserta didik diharapkan memperoleh pembelajaran yang lebih mendalam, praktik industri yang lebih lama, serta sertifikasi kompetensi yang diakui secara internasional sehingga siap bersaing di pasar kerja luar negeri. Namun, hasil implementasi di lapangan menunjukkan bahwa (1) sekolah belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan kurikulum empat tahun, baik dari segi sarana prasarana, kemitraan industri luar negeri, maupun tenaga pendidik yang memiliki kompetensi internasional dan (2) perusahaan luar negeri yang mensyaratkan standar kompetensi tertentu yang belum seluruhnya diakomodasi oleh kurikulum SMK empat tahun.

Beberapa SMK di DKI Jakarta telah menerapkan program empat tahun dan telah mengembangkan program keahlian spesifik yang disesuaikan dengan kebutuhan industri dan potensi kerja di masa depan. Misalnya, SMK Negeri 4 Jakarta memiliki fokus pada KK Desain Interior dan Teknik Furnitur, Teknik

Konstruksi Gedung, Sanitasi dan Perawatan, serta Teknik Mekatronik. SMK Negeri 52 Jakarta lebih terfokus pada pengembangan keahlian di bidang Desain Interior dan Teknik Furnitur, memperkuat keunggulan kompetensi dalam bidang kreatif dan manufaktur mebel. SMK Negeri 68 Jakarta juga mengembangkan KK Teknik Fabrikasi Logam dan Manufaktur yang harus menerapkan program pendidikan empat tahun. Program ini bertujuan untuk memperdalam kompetensi siswa, khususnya dalam aspek produksi industri berbasis teknologi tinggi, sehingga lulusan lebih siap memasuki pasar kerja nasional maupun internasional.

SMK Negeri 4 Bandung, sebagai salah satu sekolah rujukan nasional dan *Pusat Keunggulan (PK)*, dikenal berhasil menjalin kerja sama internasional dengan berbagai perusahaan teknologi dan lembaga sertifikasi global. Sekolah ini menjadi contoh penerapan praktik pembelajaran berbasis proyek (*project-based learning*), pembelajaran bilingual, serta program magang di luar negeri. Sementara itu, SMK Global Madani Bekasi sebagai sekolah swasta inovatif berorientasi internasional juga mengembangkan model kemitraan dengan perusahaan Jepang dan Korea, serta menggunakan sistem pembelajaran adaptif berbasis teknologi digital. Sekolah-sekolah tersebut menunjukkan performa unggul, namun dengan pendekatan implementasi kebijakan yang berbeda mencerminkan adanya variasi konteks, strategi, dan sumber daya antar lembaga.

Perbedaan konteks menarik untuk dikaji dalam kerangka studi multi kasus, agar diperoleh pemahaman komprehensif tentang bagaimana kebijakan SMK empat tahun diimplementasikan di lapangan, faktor-faktor yang mendukung atau menghambat keberhasilannya, serta bagaimana praktik baik (*best practices*) dari sekolah unggulan dapat direplikasi oleh sekolah lain. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan berbasis bukti kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, khususnya Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, guna memperkuat sistem implementasi kebijakan pendidikan vokasi berstandar internasional.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas maka penelitian ini memiliki urgensi yang sangat relevan dengan visi pembangunan nasional khususnya dalam kerangka *Asta Cita* pemerintah yang menekankan peningkatan kualitas sumber daya manusia, perluasan kesempatan kerja, dan penguatan daya saing global.

Program SMK empat tahun diharapkan mampu menjawab tantangan tersebut dengan memperkuat keterampilan teknis, penguasaan bahasa asing, serta kesiapan kerja internasional. Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian melalui judul “Strategi Peningkatan Mutu Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan Empat Tahun Berorientasi Kebekerjaan Luar Negeri (Studi Multi Kasus di SMK Negeri 26 Jakarta dan SMK Negeri 68 Jakarta).”

Pemilihan SMK Negeri 26 Jakarta dan SMK Negeri 68 Jakarta didasarkan pada pertimbangan bahwa keduanya merupakan sekolah negeri unggulan di DKI Jakarta dengan status akreditasi A dan telah menerapkan program SMK empat tahun yang berorientasi pada peningkatan kompetensi dan sertifikasi internasional dengan rekam jejak telah mengirimkan lulusan ke luar negeri. Sekolah telah menjalankan kebijakan *link and match* dengan dunia industri melalui program *Teaching Factory*, magang, dan kerja sama rekrutmen tenaga kerja luar negeri.

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan SMK empat tahun belum merata di seluruh sekolah, baik dari sisi kesiapan sumber daya, kemitraan industri, maupun tata kelola akademik.
2. Terdapat perbedaan strategi implementasi antara sekolah negeri dan swasta yang berorientasi internasional.
3. Belum banyak penelitian mendalam yang menjelaskan bagaimana kebijakan ini diimplementasikan di sekolah-sekolah unggulan.
4. Belum tersedia rekomendasi berbasis praktik baik (*best practices*) yang dapat menjadi rujukan kebijakan nasional.

## C. Fokus dan Subfokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada manajemen peningkatan mutu pendidikan sekolah menengah kejuruan empat tahun berorientasi kebekerjaan luar negeri di SMK Negeri 26 Jakarta dan SMK Negeri 68 Jakarta. Subfokus penelitian ini diantaranya: (1) implementasi kebijakan SMK empat tahun berorientasi

kebekerjaan luar negeri; (2) faktor-faktor yang mendukung dan menghambat dalam mengimplementasikan SMK empat tahun berorientasi kebekerjaan luar negeri; (3) strategi peningkatan mutu lulusan SMK empat tahun berorientasi kebekerjaan luar negeri; dan (4) praktik baik dari SMK Negeri 26 Jakarta dan SMK Negeri 68 Jakarta yang dapat dijadikan rekomendasi bagi kebijakan SMK empat tahun berorientasi kebekerjaan luar negeri.

Penelitian ini menempatkan strategi peningkatan mutu lulusan sebagai fokus utama, sementara implementasi dan faktor pendukung/penghambat dianalisis sebagai konteks pembentuk strategi.

### C. Pertanyaan Penelitian

Merujuk pada fokus da subfokus di atas, maka pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan SMK empat tahun berorientasi kebekerjaan luar negeri di SMK Negeri 26 Jakarta dan SMK Negeri 68 Jakarta?
2. Faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat dalam mengimplementasikan SMK empat tahun berorientasi kebekerjaan luar negeri di SMK Negeri 26 Jakarta dan SMK Negeri 68 Jakarta?
3. Bagaimana strategi peningkatan mutu lulusan SMK empat tahun berorientasi kebekerjaan luar negeri di SMK Negeri 26 Jakarta dan SMK Negeri 68 Jakarta?
4. Bagaimana praktik baik dari SMK Negeri 26 Jakarta dan SMK Negeri 68 Jakarta dapat dijadikan rekomendasi bagi kebijakan SMK empat tahun berorientasi kebekerjaan luar negeri?

### D. Kegunaan Penelitian

#### 1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini memiliki kegunaan teoritis dalam beberapa aspek, diantaranya:

- a) Pengembangan ilmu manajemen pendidikan

Penelitian ini memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang manajemen pendidikan, khususnya manajemen mutu di pendidikan vokasi tingkat menengah. Dengan menelaah strategi manajemen mutu pada SMK empat tahun,

penelitian ini memberikan kontribusi dalam membangun teori dan model manajemen pendidikan yang relevan dengan kebutuhan global.

b) Integrasi antara manajemen mutu dan akses global

Penelitian ini turut mengembangkan pemahaman teoretis tentang bagaimana manajemen mutu pendidikan SMK tidak hanya berorientasi pada output lokal, tetapi juga dapat memperluas akses keberlanjutan lulusan ke pasar kerja internasional. Ini menjadi perspektif baru dalam literatur manajemen mutu yang selama ini masih berfokus pada konteks lokal.

c) Kontribusi terhadap kajian pendidikan vokasi global

Dengan fokus pada program SMK empat tahun di Indonesia, studi ini relevan bagi pengembangan literatur global tentang pendidikan vokasi yang diarahkan untuk mobilitas kerja internasional.

## 2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini memberikan manfaat langsung bagi berbagai pihak:

a) Bagi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

Penelitian ini memberikan rekomendasi tentang bagaimana strategi manajemen mutu dapat diimplementasikan secara efektif untuk mendukung kesiapan lulusan menembus pasar kerja luar negeri. Ini bisa menjadi acuan bagi kepala sekolah, penjaminan mutu, dan guru dalam menyusun program penguatan mutu pendidikan.

b) Bagi pemerintah dan pengambil kebijakan

Temuan penelitian ini dapat digunakan oleh Dinas Pendidikan dan Kementerian terkait untuk menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam pengembangan SMK 4 tahun, termasuk dalam menyusun kebijakan kerja sama internasional, peningkatan kurikulum, dan sertifikasi kompetensi kerja global. Selanjutnya, menjadi dasar penyusunan kebijakan pembinaan SMK empat tahun yang lebih adaptif dan kontekstual yang berorientasi internasional, dengan menekankan pada sinkronisasi kurikulum berbasis industri global, peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan bersertifikasi internasional, serta penguatan kemitraan strategis dengan dunia usaha dan dunia industri luar negeri.

c) Bagi dunia industri dan mitra internasional

Penelitian ini memberi gambaran tentang kesiapan dan kualitas lulusan SMK 4 tahun yang potensial untuk direkrut oleh industri luar negeri. Informasi ini penting bagi perusahaan dan lembaga pelatihan kerja luar negeri dalam menjalin kemitraan strategis.

d) Bagi peneliti selanjutnya dapat menjadi rujukan untuk penelitian lanjutan.

e) Bagi orang tua dan siswa

Penelitian ini memberikan informasi penting mengenai manfaat program SMK 4 tahun dan potensi akses kerja luar negeri, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan minat masyarakat terhadap pendidikan vokasi yang berkualitas.

#### **E. State of The Art**

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pendidikan vokasi berkontribusi pada peningkatan keterampilan dan partisipasi pendidikan non-formal, namun belum sepenuhnya menjamin keberhasilan lulusan dalam dunia kerja. Roosmaa et al. (2019) dan Choi et al. (2019) menemukan bahwa meskipun pendidikan vokasi berperan dalam peningkatan kompetensi, lulusan masih menghadapi tantangan dalam memperoleh pekerjaan yang sesuai. Farías & Sevilla (2015) serta Buchs & Helbling (2016) menyoroti hambatan lulusan SMK dalam mengakses pendidikan lanjutan dan kecenderungan mereka bekerja di sektor tidak terampil.

Dalam konteks pengembangan kewirausahaan, Ni & Ye (2018) menekankan pentingnya integrasi pendidikan kewirausahaan dalam kurikulum SMK untuk membentuk niat dan kesiapan berwirausaha. Di Indonesia, Prima et al. (2025) menunjukkan adanya kesenjangan mutu antara SMK di kota dan desa yang mempengaruhi kesiapan kerja lulusan. Pristi et al. (2023) menambahkan bahwa peningkatan kualitas SMK dapat mendorong daya saing Usaha Kecil dan Menengah (UKM), sehingga mendukung pengembangan ekonomi lokal. Studi lain menunjukkan adanya keterkaitan antara lulusan SMK dengan tren pekerja migran. Elviandri & Shaleh (2022) menyoroti pentingnya perlindungan bagi pekerja migran lulusan SMK di era adaptasi kebiasaan baru. Andriansyah & Kamalia (2021) menegaskan bahwa penerapan standar nasional pendidikan berpengaruh terhadap peluang kerja lulusan. Untuk memperkuat keterkaitan pendidikan dengan dunia

kerja, Bolli et al. (2018) dan Brunetti & Corsini (2019) merekomendasikan peningkatan kolaborasi antara lembaga pendidikan vokasi dan sektor industri.

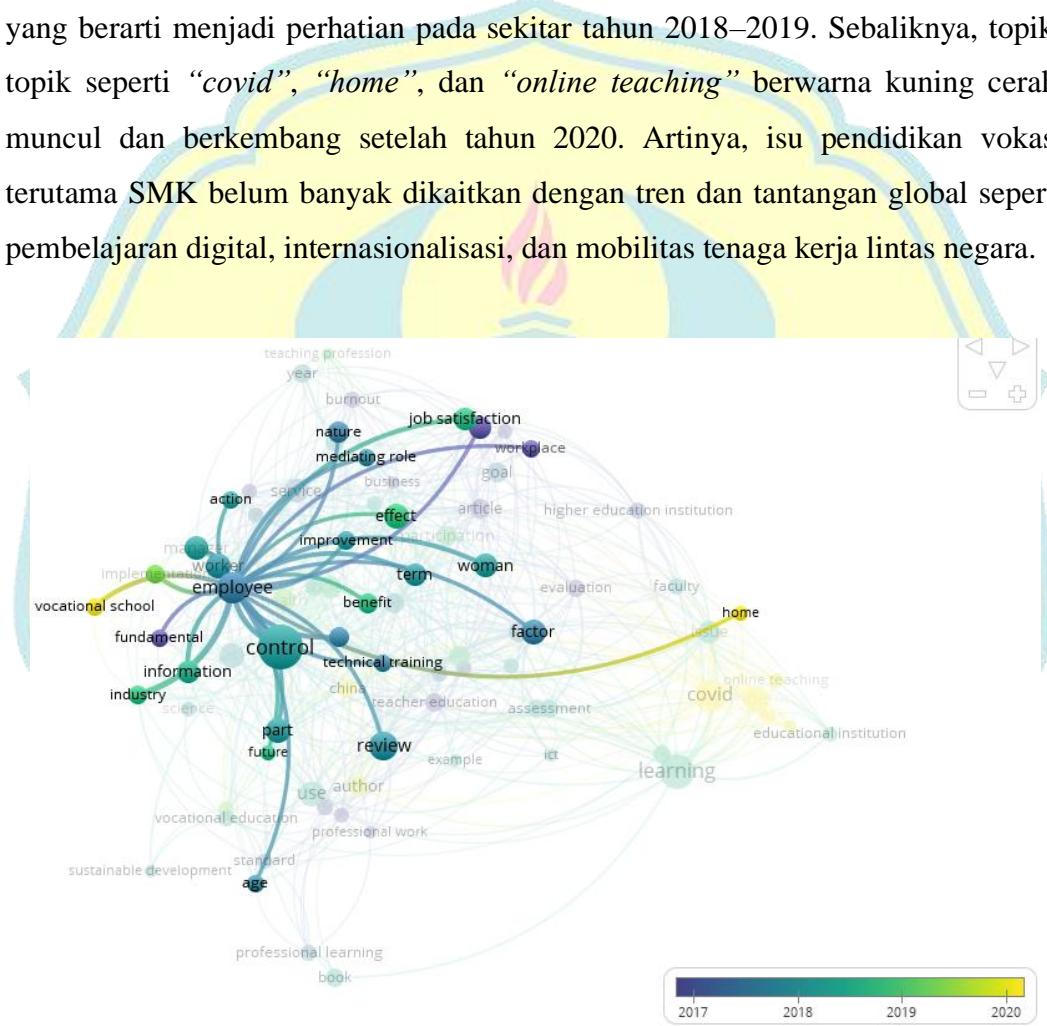
Meskipun sejumlah penelitian telah menyoroti dinamika pendidikan vokasi, peningkatan mutu SMK, dan keterkaitannya dengan dunia kerja, belum ada studi yang secara spesifik menelusuri bagaimana strategi peningkatan mutu lulusan SMK empat tahun berkontribusi terhadap akses kebekerjaan luar negeri. Penelitian ini menggabungkan konsep manajemen mutu pendidikan vokasi dengan orientasi kebekerjaan global, menghasilkan model strategis yang belum banyak dikaji dalam konteks SMK di Indonesia. Meski kebijakan SMK 4 tahun diterapkan untuk meningkatkan kompetensi lulusan, belum semua sekolah menunjukkan hasil yang signifikan pada mutu manajemen dan kesiapan kerja lulusan.

Terdapat celah penelitian penting yang belum banyak dikaji terkait SMK 4 tahun. *Pertama*, belum ada penelitian yang secara spesifik mengkaji hubungan antara manajemen mutu SMK 4 tahun dengan akses keberlanjutan pendidikan atau kerja ke luar negeri. *Kedua*, SMK 4 tahun belum banyak diposisikan sebagai entitas berbeda dari SMK reguler, padahal sekolah memiliki kurikulum, pola magang, dan target kompetensi yang khas dan memerlukan kajian tersendiri. *Ketiga*, riset yang mengaitkan manajemen mutu SMK dengan strategi internasionalisasi lulusan masih sangat terbatas, padahal aspek seperti kuliah di luar negeri, magang internasional, dan kerja legal di luar negeri menjadi isu strategis. *Keempat*, belum ada integrasi riset antara manajemen mutu sekolah dan peran SMK dalam diplomasi pendidikan atau ketenagakerjaan luar negeri. Potensi SMK dalam menghasilkan lulusan berstandar global dengan sertifikasi internasional dan kompetensi lintas budaya masih belum tergali secara optimal.

Selanjutnya, penelusuran terkait topik penelitian telah dilakukan peneliti dalam rangka mengetahui posisi penelitian yang akan dikerjakan, dengan menggunakan *software Vosviewer* yaitu sebuah perangkat lunak yang dapat menampilkan sebuah topik atau subjek yang sedang trend diteliti serta keterkaitan setiap subjek digambarkan dalam bentuk jaringan yang saling terhubung.

Tangkapan layar hasil penelusuran pada gambar 1.2 memperlihatkan kata kunci seperti “*vocational school*”, “*technical training*”, dan “*vocational education*” memiliki node berukuran kecil, berwarna hijau tua, dan berada di

pinggiran jaringan. Ini menunjukkan bahwa topik tersebut muncul dalam literatur sekitar tahun 2018–2019, namun tidak berkembang secara signifikan atau tidak menjadi topik dominan. Selain itu, node-node ini tidak terkoneksi kuat dengan tema strategis seperti “access”, “mobility”, atau “international”. Hal ini menandakan bahwa SMK, sebagai konteks pendidikan vokasi belum menjadi pusat perhatian dalam diskursus global. Sedangkan skala warna di kanan bawah, terlihat bahwa topik “vocational school” dan “technical training” didominasi warna hijau tua, yang berarti menjadi perhatian pada sekitar tahun 2018–2019. Sebaliknya, topik-topik seperti “covid”, “home”, dan “online teaching” berwarna kuning cerah, muncul dan berkembang setelah tahun 2020. Artinya, isu pendidikan vokasi terutama SMK belum banyak dikaitkan dengan tren dan tantangan global seperti pembelajaran digital, internasionalisasi, dan mobilitas tenaga kerja lintas negara.



Gambar 1.2 Visualisasi topik sekolah kejuruan